

**MELAMPAUI POLITIK UANG
STUDI KASUS PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK
DALAM PILWAKO MEDAN TAHUN 2020**

Oleh;

Rafif Pamenang Imawan, Dimas Ramadhan

Populi Center

raimwn@gmail.com

dimsramadhan@gmail.com

Abstrak

Bangsa Indonesia perlu untuk belajar dari pengalaman-pengalaman pelaksanaan pemilu serentak di periode-periode sebelumnya, terutama apabila hendak melaksanakan pemilu 2024 dengan baik. Artikel ini hendak berkontribusi dengan memberikan potret evaluasi pelaksanaan Pilwako Medan tahun 2020, terutama untuk menjawab pertanyaan kunci bagaimana hubungan antara faktor polarisasi politik, politik uang, dan kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara pemilu terhadap meningkatnya angka partisipasi pemilih dalam pilwako 2020 di kota Medan? Studi ini dilakukan mengingat terdapat peningkatan angka partisipasi pilwako kota Medan tahun 2020. Padahal di tahun-tahun sebelumnya tingkat partisipasi masyarakat selalu rendah. Menggunakan pendekatan kuantitatif dan data survei bulan November 2020, artikel ini menunjukkan bahwa politik uang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi pemilih. Pengaruh paling kuat justru ada pada kepercayaan terhadap Bawaslu, preferensi pemilih, dan usia. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi tinggi tidak selalu ditandai dengan adanya praktik politik uang, tetapi dapat pula dipicu oleh kepercayaan pada lembaga penyelenggara maupun pengawas. Hasil studi ini memberikan pembelajaran bahwa penting untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara maupun pengawas, terutama untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan berkeadilan pada pemilu 2024. Limitasi dari studi ini ada pada

elaborasi politik uang yang sangat mungkin tidak sepenuhnya dapat ditangkap melalui analisa kuantitatif.

Kata kunci: Politik Uang, Kepercayaan, Partisipasi Politik

Abstract

The Indonesian people need to learn from the experiences of holding simultaneous elections in previous periods, especially if they want to carry out the 2024 elections successfully. This article would like to contribute to the discourse on election by providing a portrait of the evaluation of the implementation of the 2020 Medan elections, especially to answer the key question on how is the relationship between political polarization factors, money politics, and trust in election management institutions to the increase in voter turnout in the 2020 elections in Medan city? This study was carried out based on consideration that there was an increase in the participation rate for the mayoral election in Medan in 2020. Whereas in previous years the level of public participation was always low. Using a quantitative approach and November 2020 survey data, this article shows that money politics does not have a significant effect on voter participation. The strongest influence lies in trust in Bawaslu, voter preferences, and age. These results indicate that a high level of participation is not always indicated by the practice of money politics, but can also be triggered by trust in the organizing and supervisory institutions. This study highlighted that it is important to maintain and increase trust in the organizing and supervisory institutions, in the effort to encourage the implementation of elections with integrity and justice in the 2024 elections. The limitation of this study lies in the elaboration of money politics which may not be fully captured through quantitative analysis.

Keywords: Money Politics, Trust, Political Participation

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 merupakan tonggak penting untuk melihat apakah kualitas demokrasi di Indonesia membaik atau memburuk. Pemilu tahun tersebut dapat dikatakan sebuah tonggak penting dikarenakan beberapa alasan. Pertama, pemilu tahun 2024 merupakan pemilu kelima bagi bangsa Indonesia untuk dapat memilih presiden dan wakil presiden secara langsung¹. Kedua, pelaksanaan pemilu 2024 dilaksanakan tanpa mengubah regulasi yang mendukungnya dengan tetap mengacu pada UU 7/2017 tentang pemilihan umum².

¹ Pemilu 2004 merupakan pemilu langsung pertama di Indonesia. Artinya, warga negara memiliki hak untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Hal ini berbeda dengan periode sebelumnya, ketika presiden dan wakil presiden dipilih melalui perwakilan di Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) Republik Indonesia. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa pemilu 2004 merupakan tonggak penting dari pemilu dengan agenda besar penguatan presidensialisme.

² Salah satu dinamika penting dari setiap pelaksanaan pemilu ada pada perubahan undang-undangan yang mengaturnya. Perubahan ini dilakukan seiring dengan perubahan aturan-aturan lain yang meliputinya, dikenal dengan paket undang-undang politik. Salah satu isu krusial yang diatur dalam undang-undang politik berkaitan dengan ambang

Ketiga, apabila pelaksanaan pemilu dilakukan dalam kondisi pandemi COVID-19, maka pemilu ini akan menjadi salah satu suksesi penting kepemimpinan nasional di tengah ancaman krisis.

Di luar ketiga alasan tersebut, apabila dilihat dari aspek prosedural, pemilu di Indonesia merupakan pemilu yang terus menerus mencoba memperbaiki prosedur pelaksanaannya. Salah satu perubahan prosedural yang paling terlihat ada pada pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2019³. Dari aspek politik,

batas parlemen (*parliamentarythreshold*) dan ambang batas pencalonan presiden (*presidentialthreshold*).

³ Pemilu serentak di Indonesia pada dasarnya telah dilaksanakan sebelumnya pada pilkada serentak 2017. Perbedaan utama antara pilkada serentak dan pemilu serentak 2019, selain ada pada tingkatan pelaksanaan (lokal dan nasional), ada pula pada tingkat kerumitan pelaksanaan pemilu. Pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019, pemilihan diminta untuk memilih perwakilan di daerah dan nasional, untuk wakil mereka di eksekutif dan legislatif pada satu waktu. Terdapat banyak catatan untuk pelaksanaan pemilu serentak 2019 ini, termasuk salah satunya polarisasi politik dan sinkronisasi data kependudukan. Lihat: Gatra, 10 Januari 2020, Sejumlah Catatan Pemilu 2019 dari Perludem, <https://www.gatra.com/detail/news/465376/politik/sejumlah-catatan->

pelaksanaan pemilu serentak pada satu waktu dilakukan untuk memperkuat sistem presidensial, mengingat presiden terpilih bersamaan dengan terpilihnya wakil rakyat di parlemen. Melalui desain ini, diharapkan presiden terpilih tidak tersandera oleh hasil pemilihan anggota parlemen/peta koalisi. Meski perbaikan prosedural telah dilakukan, namun masih terdapat beberapa isu berkaitan dengan hak pilih warga negara. Salah satu isu yang terus menerus menjadi agenda serius dari satu perhelatan pemilu ke pemilu lainnya ada pada isu daftar pemilih tetap (DPT)⁴, politik uang⁵, hingga keamanan

dan partisipasi⁶.

Pada aspek demokrasi substantif, wacana di ruang-ruang publik telah dipenuhi oleh beberapa bahasan yang membahas relasi kuasa dan pemenuhan hak-hak warga negara. Wacana terkait dengan isu perempuan⁷, lingkungan⁸, dinasti politik⁹, maupun

⁶Aspek keamanan menjadi aspek penting dalam pelaksanaan pemilu. Tolak ukur keamanan bahkan menjadi salah satu tolak ukur penting untuk melihat apakah pemilu tersebut berintegritas dan berkualitas dalam analisa lintas negara (*crosscountriesstudies*). Lihat: Norris, P., Frank, R. W., & i Coma, F. M. (2013). Assessing The QualityOfElections. *JournalofDemocracy*, 24(4), 124-135.

⁷Isu keterwakilan perempuan menjadi salah satu isu yang terus muncul dari pemilu ke pemilu, termasuk pemilu tahun 2024. Lihat: Bisnis.com, 16 November 2021, Tim Pansel KPU-Bawaslu Diminta Upayakan 30 Persen Keterwakilan Perempuan, <https://kabar24.bisnis.com/read/20211116/15/1466667/tim-pansel-kpu-bawaslu-diminta-upayakan-30-persen-keterwakilan-perempuan>.

⁸Hasil survei terbaru dari Indikator menunjukkan bahwa 82 persen responden (pemilih muda) memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap isu perubahan iklim. Lihat: Tempo, 27 Oktober 2021, Survei Indikator: Isu Perubahan Iklim Jadi Perhatian Mayoritas Pemilih Pemula, <https://nasional.tempo.co/read/1521730/survei-indikator-isu-perubahan-iklim-jadi-perhatian-mayoritas-pemilih-pemula/full&view=ok>

⁹Dinasti politik menjadi persoalan serius dalam politik di Indonesia, termasuk dalam pelaksanaan pilkada tahun

pemilu-2019-dari-perludem

⁴Salah satu persoalan serius terkait dengan DPT dalam pemilu di Indonesia disebabkan oleh proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang sering kali dinilai tidak maksimal. Lihat: Tirta, 19 Maret 2019, Banyak Masalah Soal DPT, Bawaslu Kritik Coklit KPU Tak Maksimal, <https://tirta.id/banyak-masalah-soal-dpt-bawaslu-kritik-coklit-kpu-tak-maksimal-djQb>

⁵Politik uang merupakan persoalan cukup rumit diukur dalam praktik politik di Indonesia, hak ini disebabkan politik uang sering kali sulit terlacak, mengingat aturan hukum yang ada. Lihat: Manah, F.H. 25 Juni 2021, Politik Uang dan Solusinya dalam Hukum, <https://rumahpemilu.org/politik-uang-dan-solusinya-dalam-hukum/>

kerawanan pemilu¹⁰. Munculnya wacana-wacana ini dalam ruang-ruang publik dapat menjadi indikasi yang baik, bahwa wacana-wacana yang selama ini terpinggirkan, dapat menemukan ruang untuk diperbincangkan oleh publik.

Batasan Bahasan

Terlepas dari perkembangan pemilu dari aspek prosedural maupun substantif, warga negara selalu akan menjadi titik utama dari sistem demokrasi. Oleh karenanya kegagalan dalam mewujudkan, melindungi, dan rendahnya partisipasi politik warga negara, dapat dikatakan sebagai kegagalan mendorong pemilu yang inklusif, partisipatif, dan adil¹¹. Artikel

ini hendak membahas partisipasi pemilih di kota Medan pada pilkada tahun 2020, terutama untuk melihat hubungan antara tiga hal penting, yakni populisme/praktik politik populis¹², politik uang¹³, dan kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara maupun

pemilu berintegritas. Dalam diskursus ilmu politik, pemilu berintegritas menjadi tolak ukur penting, terutama berkaitan dengan bagaimana aspek kompetisi, pemenuhan hak warga negara, serta pelaksanaan pemilu yang adil dapat terjamin.

¹²Populisme menjadi bahasan yang penting, mengingat populisme mendorong pembilahan sosial di masyarakat. Apabila kandidat terdiri dari dua pasangan calon dan praktik politik. Praktik paling terlihat ada pada pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017, ketika populisme kian peranan besar. Mobilisasi isu agama diikuti dengan pembilahan sosial dan partisipasi politik yang meningkat. Lihat: Agusta, T. R. (2020). Gerakan Politik Dan Populisme Islam (Studi Kasus Aksi Bela Islam 411 Dan 212 Tahun 2016). Skripsi.

¹³Politik uang telah lama dilihat sebagai salah satu penjelas tinggi rendahnya partisipasi politik. Asumsinya, apabila politik uang bekerja maka partisipasi politik akan meningkat. Lihat: Subekti, T. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Studi TurnofVoter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013). Skripsi; Avenus, A., & Alfina, D. (2020). Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 6(3), 585-610.

2020. Lihat: Tempo, 12 Desember 2020, Dinasti Politik Ramaikan Pilkada 2020, Ini Daftarnya, <https://nasional.tempo.co/read/1413795/dinasti-politik-ramaikan-pilkada-2020-ini-daftarnya>

¹⁰Kerawanan pemilu menjadi salah satu tolak ukur penting dalam upaya mendorong integritas pemilu. Bawaslu RI telah membuat indeks kerawanan pemilu, sebuah indeks yang berguna untuk melakukan mitigasi terhadap potensi pelanggaran pelaksanaan pemilu di Indonesia.

¹¹Pelaksanaan pemilu yang menekankan inklusivitas, partisipatif, dan adil merupakan indikator-indikator penting dari konsepsi mengenai

pengawas pemilu¹⁴.

Praktik politik populis atau terbelahnya pemilih ke dalam dua kubu dalam beberapa kajian pustaka dilihat sebagai faktor yang mendorong atau meningkatkan tingkat partisipasi, tetapi di sisi yang lain juga dapat menurunkan tingkat partisipasi politik¹⁵. Hal yang sama berlaku untuk politik uang, bahwa afirmatifnya masyarakat terhadap politik uang menjadi penjelus mengapa partisipasi pemilih cukup tinggi dalam sebuah perhelatan pemilu. Hal yang belum banyak terelaborasi adalah hubungan antara kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara pemilu dengan tingkat partisipasi politik warga negara. Bahasan terakhir ini menekankan pada dimensi pilihan rasional

(*rationalchoice*) dari warga negara apabila pemilu dilaksanakan menurut asumsi pemilih bahwa pemilu penyelenggara dan pemilu netral.

¹⁴Hubungan antara kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara dan partisipasi politik belum banyak dilakukan. Asumsi utama dari uji hubungan ini adalah bahwa kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara yang tinggi menunjukkan bahwa pemilu tersebut berintegritas. Hal tersebut yang kemudian mendorong partisipasi pemilih.

¹⁵Anggia, R. (2019). Pengaruh# 2019GantiPresiden sebagai Gerakan Populis terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Mahasiswa Universitas Padjadjaran, Skripsi.

Grafik 1.
Partisipasi Pemilih Kota Medan (2010 - 2020)¹⁶



Sumber: KPUD-medankota.go.id

Kasus Pemilihan Walikota (Pilwako) Medan menjadi menarik, mengingat tingkat partisipasi pemilih di pilwako Kota Medan selalu rendah (lihat grafik 1). Menariknya partisipasi pemilih Kota Medan pada perhelatan politik di tingkat provinsi maupun nasional cukup tinggi. Faktor lain ada pada masih sedikitnya kajian terkait dengan partisipasi pemilih di Kota Medan.

¹⁶Pilwako Medan 2010 (I) merujuk pada pilwako Medan 2010 putaran pertama, sedangkan pilwako Medan 2010 (II) merujuk pada pilwako Medan 2010 putaran kedua.

Terdapat beberapa penjasar partisipasi pemilih, mulai dari semakin rasionalnya para pemilih di Kota Medan¹⁷, golongan putih¹⁸, persoalan data pemilih¹⁹, hingga pentingnya faktor strategi sosialisasi dari KPU RI dalam mendorong partisipasi pemilih²⁰. Hasil studi yang ada

belum memberikan data empiris mengapa suara partisipasi meningkat atau tidak meningkat dalam Pilwako Medan.

Berdasarkan elaborasi singkat yang ada, secara umum pertanyaan yang hendak dijawab dalam artikel ini adalah bagaimana hubungan antara faktor polarisasi politik, politik uang, dan kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara pemilu terhadap meningkatnya angka partisipasi pemilih dalam Pilwako 2020 di Kota Medan?

Metode

Analisa data dalam artikel ini merupakan analisa kuantitatif. Artinya data kuantitatif menjadi sumber data utama yang digunakan untuk melakukan analisa. Sumber utama olah data yang digunakan adalah temuan survei Populi Center di Kota Medan pada bulan November 2020. Survei dilakukan dengan 800 responden, wawancara tatap muka, pengambilan data mulai dari tanggal 1 - 6 November 2020, tingkat kepercayaan 95 persen, dan *margin of error* (MoE) sebesar

¹⁷Sirait, B. C. (2017). Perilaku Tidak Memilih Pada Pilkada Sumatera Utara 2013 di Kota Medan. *SociaePolites*, 18(01), 68-91.

¹⁸Nasution, F. A., & Kushandajani, K. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Medan Maimun Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7(2), 227-235.

¹⁹Thamrin, M. H., Nasution, M. A., & Nasution, F. A. (2020). Problematik Data Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kota Medan. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 6(2), 157-167.

²⁰Ardhie, G. D. (2019). Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada pilkada Kota Medan Tahun 2015, (Skripsi, Universitas Medan Area); Harefa, M.R.K. (2020). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Kota Medan Tahun 2020, (Skripsi, UMSU); Nasution, N. (2013). Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Pilkada Kota Medan. *KESKAP, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol II Edisi 2 Edisi Rajab 1434H/Mei 2013; Simarmata, B. R. P. (2020). Peran Humas Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Dalam Mensosialisasikan Pilkada 2020. (Skripsi, UMSU)

3,39 persen.

Hipotesis utama dalam studi ini ialah bahwa kepercayaan seseorang terhadap lembaga pengawas pemilu, pilihan politik yang kuat pada kandidat politik, serta politik uang berhubungan dengan partisipasinya untuk memilih pada Pilwako Medan 2020. Dalam analisa, variabel *trust* mewakili pertanyaan mengenai kepercayaan pemilih terhadap Bawaslu, dengan empat variasi respons/jawaban; Sangat tidak percaya, tidak percaya, percaya, dan sangat percaya. Hal yang sama juga diterapkan pada variabel kepercayaan terhadap KPU.

Selain variabel *trust*, sejumlah faktor lain yang diduga sebagai prediktor patut dipertimbangkan dalam analisa untuk menjelaskan partisipasi pemilih dalam Pilwako Medan, terutama untuk melihat apakah hubungan tersebut bersifat *spourius* atau tidak. Ada pun variabel prediktor sebagai kontrol atas Trust ini ialah preferensi calon walikota yang didukung, serta adanya dorongan politik uang. Preferensi calon yang dimaksud ialah orang yang

telah memiliki preferensi atau pilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara sebelum Pilwako Medan digelar. Sementara yang dimaksud dengan politik uang dalam analisa ini ialah apakah pemberian sejumlah uang dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam memilih calon tertentu atau tidak. Prediktor lainnya yang digunakan ialah sejumlah variabel demografi responden seperti usia/umur, tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, serta gender.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil olah data survei Populi Center di bulan November 2020 menunjukkan beberapa temuan menarik. Mempertegas uraian sebelumnya, bahwa variabel utama yang digunakan dalam tulisan ini adalah kepercayaan terhadap Bawaslu, sedangkan variabel preferensi pilihan dan politik uang menjadi variabel kontrol. Analisa terhadap hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk melihat apakah variabel *trust* yang diduga mempengaruhi partisipasi bersifat spourius atau tidak. Terkait dengan variabel preferensi, adalah sebuah keniscayaan apabila seseorang berpartisipasi karena ingin menjadikan calon pilihannya keluar sebagai pemenang.

Sementara disisi lain, politik uang disebut-sebut dianggap memiliki kontribusi besar dalam mendorong seseorang untuk memilih²¹. Konteks penyelenggaraan Pilwako Medan yang dilakukan

di saat pandemi COVID-19 diprediksi juga semakin menguatkan potensi praktek jual beli suara, sebagaimana dikhawatirkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu²². Jika perspektif pilihan rasional pada teori perilaku pemilih diterapkan dalam konteks tulisan ini, maka asumsi yang dibangun ialah bahwa pemilih melakukan *trade off* atas *cost* yang dikeluarkannya, yaitu berpartisipasi pada Pilwako Medan disaat pandemi untuk memilih calon tertentu dengan mengorbankan keselamatannya karena adanya dorongan untuk menerima sejumlah uang.

²¹Muhtadi, B. (2020), Kuasa Uang: Politik Uang Dalam Pemilu Indonesia Pasca Orde Baru, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia

²²DKPP, 25 November 2020, Alfitra Salamm: Politik Uang Ancaman Terbesar Pilkada Serentak 2020, <https://dkpp.go.id/alfitra-salamm-politik-uang-ancaman-terbesar-pilkada-serentak-2020/>

Tabel 1.
Regresi Logistik

Partisipasi	Odds Ratio	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]
Trust_Bawaslu	2.308308	.5456208	3.54	0.000	1.452423 3.66855
Trust_KPU	1.423815	.3256944	1.54	0.122	.9093752 2.229277
Politik uang	.9514109	.2877221	-0.16	0.869	.5259579 1.721017
Preferensi_Akhyar	2.456543	.7728779	2.86	0.004	1.325926 4.551238
Preferensi_Bobby	2.420269	.7804636	2.74	0.006	1.286403 4.553553
Umur	1.035321	.010511	3.42	0.001	1.014923 1.056128
Tk_Penghasilan	1.094207	.1415462	0.70	0.486	.8491575 1.409972
Tk_pendidikan	1.162429	.1497301	1.17	0.243	.9030772 1.496263
Gender	1.361422	.3327652	1.26	0.207	.8432144 2.1981
_cons	.0086743	.009781	-4.21	0.000	.0009515 .0790751

Sumber: Survei Populi Center, November 2020, diolah

Secara keseluruhan, analisa regresi logistik menunjukkan variabel yang memiliki pengaruh pada partisipasi pemilih (Y) antara lain adalah variabel kepercayaan kepada Bawaslu, responden yang telah memiliki preferensi memilih calon walikota yang ada yaitu Akhyar Nasution (Akhyar) dan Bobby Afif Nasution (Bobby), serta variabel umur. Keempat variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi mengingat angka *p-value* berada di bawah alpha 0.05. Adapun variabel lain seperti kepercayaan terhadap KPU, politik uang, tingkat pengeluaran, tingkat pendidikan, dan gender tidak

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi pemilih. Dari keempat variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi pemilih, variabel kepercayaan terhadap Bawaslu menjadi variabel yang paling signifikan terhadap partisipasi pemilih. Ini terlihat dari nilai *p-value* variabel Trust_Bawaslu, yakni sebesar 0.000.

Hasil yang diperoleh sebagaimana termuat dalam Tabel 1 membawa kita pada sebuah hasil generik tentang partisipasi pemilih dalam Pilwako Medan tahun 2020: semakin tinggi kepercayaan seseorang kepada Bawaslu, serta semakin jelas pilihan politiknya (baik Akhyar atau

Bobby), dan semakin matang usia seseorang, maka semakin besar kemungkinan ia berpartisipasi dalam pemilihan.

Untuk mengukur seberapa besar variabel-variabel tersebut mempengaruhi partisipasi seseorang dalam Pilwako Medan, maka perlu dihitung probabilitas dari setiap variabel yang memiliki hubungan yang signifikan. Rumus untuk menghitung probabilitas sebagai berikut:

$$(oddsratio) - 1 \times 100 = probability Y$$

Berdasarkan rumus atau perhitungan di atas, maka kemungkinan seseorang untuk berpartisipasi dalam Pilwako ialah antara lain sebagai berikut. Pertama, bahwa setiap satu tingkat kenaikan pada level kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara, dalam hal ini Bawaslu, menaikkan kemungkinan (*odds*) untuk memilih dalam Pilwako Medan sebesar 2,30 kali lipat atau sebesar 130 persen.

Kedua, pada variabel terkait dengan dukungan terhadap kedua tokoh utama yang berkontestasi pada

Pilwako Medan tahun 2020, keduanya memiliki hubungan yang positif. Pada variabel preferensi Akhyar, mereka yang akan memilih Akhyar memiliki kemungkinan dua kali lebih tinggi (atau sekitar 145 persen) dibandingkan mereka yang tidak memilih Akhyar. Hal yang sama juga berlaku pada variabel preferensi Bobby. Mereka yang merupakan pendukung Bobby, memiliki kemungkinan 2,42 kali lipat (atau 142 persen) untuk menggunakan hak pilihnya dibanding yang tidak memilih tokoh tersebut.

Ketiga terakhir, pada variabel umur, setiap satu tahun penambahan usia pemilih di Kota Medan meningkatkan kemungkinan untuk berpartisipasi sebesar 1,03 kali lipat atau sebesar 3 persen.

Sementara itu, kepercayaan terhadap KPU tidak mempengaruhi partisipasi pemilih di Kota Medan. Signifikansinya menjadi hilang terutama ketika analisa mempertimbangkan kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara lainnya, dalam hal ini ialah Bawaslu. Baik mereka yang percaya atau tidak

percaya dengan KPU tidak punya banyak pengaruh terhadap partisipasi. Kemudian, perkiraan bahwa politik uang turut mempengaruhi partisipasi juga tidak terlihat. Mereka yang mempertimbangkan pilihannya berdasarkan insentif sejumlah uang (dalam hal ini termasuk juga yang tidak mempertimbangkannya), tidak signifikan mempengaruhi partisipasi.

Pada variabel kontrol terkait demografi, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan perbedaan jenis kelamin pemilih tidak signifikan dalam menjelaskan partisipasi seseorang untuk menggunakan hak suaranya pada Pilwako Medan 2020. Hasil ini menarik mengingat Kota Medan memiliki beberapa kasus korupsi, terutama korupsi yang menjerat tiga Walikota Medan²³. Hal lain yang perlu untuk menjadi perhatian adalah kontestasi Pilwako Kota Medan tahun 2020 yang kuat dengan

nuansa politik identitas²⁴, terutama mengingat hanya terdapat dua pasang calon yang berkontestasi.

C. PENUTUPAN

Kesimpulan

Hasil analisa survei menunjukkan bahwa politik uang, kepercayaan terhadap KPU, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan gender tidak berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat di Kota Medan. Sebaliknya, tingkat kepercayaan terhadap Bawaslu, preferensi memilih, dan usia menjadi faktor penting untuk mendorong partisipasi publik. Secara singkat, kontribusi

²³CNN Indonesia, 16 Oktober 2019, Tiga Wali Kota Medan Berturut-turut Terjerat Korupsi, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191016165658-12-440068/tiga-wali-kota-medan-berturut-turut-terjerat-korupsi>.

²⁴Salah satu babak yang menarik dari kontestasi pilwako Medan ada ketika terdapat dukungan dari Ustadz Abdul Somad ke pasangan Akhyar Nasution dan Aulia Rachman. Pada satu tahun sebelumnya terdapat kontestasi yang keras dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Sumatera Utara yang turut membawa isu politik identitas. Lihat: Detik.com, 1 Desember 2020, Tudingan Kubu Bobby soal Politik Identitas Kala Akhyar Gandeng UAS, <https://news.detik.com/berita/d-5276255/tudingan-kubu-bobby-soal-politik-identitas-kala-akhyar-gandeng-uas>.; BBC, 26 Juni 2018, Politik identitas ramai di Pilgub Sumatera Utara, isu korupsi jadi terabaikan?, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44601789>

tulisan ini hendak menunjukkan bahwa kenaikan tingkat partisipasi tidak selalu berhubungan dengan cara non demokratis seperti praktik politik uang. Kepercayaan yang tinggi terhadap Bawaslu sebagai pengawas pemilu menjadi faktor paling penting, di samping faktor kontestasi pemilu (preferensi pemilih) maupun usia.

Meski demikian, penulis menyadari masih adanya keterbatasan dalam tulisan ini memiliki. Pertama, hasil analisa kuantitatif terkait dengan politik uang tidak serta merta menjelaskan bahwa tidak ada praktik politik uang. Politik uang dalam penelitian ini merujuk pada apakah masyarakat afirmatif terhadap praktik politik uang, hal ini tentu berbeda dengan praktik nyata mengenai politik uang. Pengukuran ada tidaknya politik uang dapat dilakukan atau terukur dengan jelas, terutama apabila ada kasus yang terkuak. Kedua, mengingat studi ini didasarkan sepenuhnya pada analisa kuantitatif, maka modus seperti politik uang hingga persoalan preferensi pemilih tidak dapat

terungkap seperti dalam penelitian kualitatif.

Saran

Merujuk pada hasil studi ini, maka perlu untuk memperkuat fungsi dan daya jangkau dari Bawaslu. Mengingat kepercayaan terhadap Bawaslu memiliki dampak positif terhadap partisipasi pemilih, dengan kata lain ketika masyarakat percaya Bawaslu menjalankan tugasnya secara profesional dan adil dalam pengawasan, maka partisipasi pemilih meningkat. Hasil studi ini memberikan pembelajaran bahwa penting untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara maupun pengawas, terutama untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan berkeadilan pada pemilu 2024. Temuan ini memang masih harus diperkuat dengan studi yang lebih mendalam, namun paling tidak temuan ini dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat kualitas pemilu di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Agusta, T. R. (2020). Gerakan Politik dan Populisme Islam (Studi Kasus Aksi Bela Islam 411 dan 212 Tahun 2016). Skripsi

Anggia, R. (2019). Pengaruh #2019GantiPresiden sebagai Gerakan Populis terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Mahasiswa Universitas Padjadjaran, Skripsi.

Ardhie, G. D. (2019). Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Kota Medan Tahun 2015, (Skripsi, Universitas Medan Area).

Averus, A., & Alfina, D. (2020). Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 6(3), 585-610.

BBC, 26 Juni 2018, Politik identitas ramai di Pilgub Sumatera Utara, isukorupsi jadi terabaikan?, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44601789>

Bisnis.com, 16 November 2021, Tim Pansel KPU-Bawaslu Diminta Upayakan 30 Persen Keterwakilan Perempuan, <https://kabar24.bisnis.com/read/20211116/15/1466667/tim-pansel-kpu-bawaslu-diminta-upayakan-30-persen-keterwakilan-perempuan>.

CNN Indonesia, 16 Oktober 2019, Tiga Wali Kota Medan Berturut-turut Terjerat Korupsi, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191016165658-12-440068/tiga-wali-kota-medan-berturut-turut-terjerat-korupsi>.

Detik.com, 1 Desember 2020, Tudingan Kubu Bobby soal Politik Identitas Kala Akhyar Gandeng UAS, <https://news.detik.com/berita/d-5276255/tudingan-kubu-bobby-soal-politik-identitas-kala-akhyar-gandeng-uas>.

DKPP, 25 November 2020, Alfitra Salamm: Politik Uang Ancaman Terbesar Pilkada Serentak 2020, <https://dkpp.go.id/alfitra-salamm-politik-uang-ancaman-terbesar-pilkada-serentak-2020/>

Gatra, 10 Januari 2020, Sejumlah Catatan Pemilu 2019 dari Perludem, <https://www.gatra.com/detail/news/465376/politik/sejumlah-catatan-pemilu-2019-dari-perludem>

Harefa, M.R.K. (2020). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Kota Medan Tahun 2020, (Skripsi, UMSU).

Manah, F.H. 25 Juni 2021, Politik Uang dan Solusinyadalam Hukum, <https://rumahpemilu.org/politik-uang-dan-solusinya-dalam-hukum/>

Muhtadi, B. (2020), Kuasa Uang: Politik Uang Dalam Pemilu Indonesia Pasca Orde Baru, Jakarta, KepustakaanPopuler Gramedia

Nasution, F. A., &Kushandajani, K. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Medan Maimun Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (JournalofGovernanceandPoliticalSocial UMA), 7(2), 227-235.

Nasution, N. (2013). Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Pilkada Kota Medan. KESKAP, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Vol II Edisi 2 Edisi Rajab 1434H/Mei 2013

Norris, P., Frank, R. W., &i Coma, F. M. (2013). Assessing the Quality of Elections. *Journal of Democracy*, 24(4), 124-135.

Simarmata, B. R. P. (2020), Peran Humas Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Dalam Mensosialisasikan Pilkada 2020. (Skripsi, UMSU)

Sirait, B. C. (2017). Perilaku Tidak Memilih Pada Pilkada Sumatera Utara 2013 di Kota Medan. *SociaePolites*, 18(01), 68-91.

Subekti, T. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013). Skripsi

Tempo, 12 Desember 2020, Dinasti Politik Ramaikan Pilkada 2020, Ini Daftarnya, <https://nasional.tempo.co/read/1413795/dinasti-politik-ramaikan-pilkada-2020-ini-daftarnya>

Tempo, 27 Oktober 2021, SurveiIndikator: IsuPerubahanIklim Jadi PerhatianMayoritasPemilihPemula, <https://nasional.tempo.co/read/1521730/survei-indikator-isu-perubahan-iklim-jadi-perhatian-mayoritas-pemilih-pemula/full&view=ok>

Thamrin, M. H., Nasution, M. A., & Nasution, F. A. (2020). Problematik Data Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kota Medan. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 6(2), 157-167.

Tirto, 19 Maret 2019, Banyak Masalah Soal DPT, Bawaslu Kritik Coklit KPU Tak Maksimal, <https://tirto.id/banyak-masalah-soal-dpt-bawaslu-kritik-coklit-kpu-tak-maksimal-djQb>